

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A'an Efendi, dan Freddy Poernomo. *Hukum Administrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Afan, dan Gaffar. *Politik Indonesia Menuju Transisi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Disunting oleh Leny Wulandari. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Dede Rosyada. *Demokrasi Hak Asasi dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media, 2000.
- Eka, Deviani, dan Yudhi Rifka. *Hukum Kepegawaian: Historisitas dan Aktualitas Aparatur Sipil Negara*. Bandar Lampung: Pustaka Media Design, 2020.
- Jimly Asshiddiqie. *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Joko, dan J.Prihatmoko. *Mendemokrasikan Pemilu dari Sistem sampai Elemen Teknis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Marbun. *Reformasi Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1998.
- Miriam Budirjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Nomensen Sinamo. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Permata Aksara, 2014.
- Nurmayani. *Hukum Administrasi Daerah*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009.
- Ramlan Surbakti. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Grasindo, 1992.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta Utara: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Sholahuddin, Abdul Hakam, dkk. *Hukum Pemilu di Indonesia*. Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023..
- Sukanto Satoto. *Pengaturan Eksistensi dan Fungsi Badan Kepegawaian Negara*. Yogyakarta: Hanggar Kreator, 2004.

- Syahrial Syarbaini. *Sosiologi dan Politik*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Topo, Santoso, dan Budiarti Ida. *Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Udaya, Majid. *Manajemen Sumber Daya Aparatur di Era Reformasi Birokrasi*, 2020.
- Yamin. *Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Umum*. Makassar: Indo Pustaka, 2013.

B. Jurnal

- Abdul Rahman. "Penataan Pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Melalui Dynamic Governance." *Jurnal Konstitusi*, Vol 1, No 1, 2023..
- Aldan Syaifullah Alulu. "Bentuk Penanganan Bawaslu Terhadap Pelanggaran Netralitas ASN." *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, Vol 1, No 3, 2024. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i3.315>.
- Angga Hafiidh Fahrizal. "Strategi Pengembangan Talenta dan Karier Aparatur Sipil Negara Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara." *Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS*, Vol 17, No 2, 2023..
- Benuf, Kornelius, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 7, No 1, 2020.
- Fatona Nisaul. "Implementasi Asas-Asas Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Fiqih Siyasah." *Jurnal Sosial dan Budaya Syari*, Vol 10, No 5, 2023..
- Jimly Asshiddiqie. "Etika Peserta Pemilu." *Jurnal Etika dan Pemilu*, Vol 2, No 3, 2018.
- Maulidya Permata Sari. "Hak Menyampaikan Pendapat Secara Elektronik Ditinjau Dari Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia." *Jurnal Wasaka Hukum* Vol 11, No 1, 2023.
- Muhammad Hilmi. "Implementasi Netralitas Aparatur Sipil Negara." *Repository Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau*, 2019.
- Rizky Hidayatiningsih. "Peran Badan Pengawas Pemilu dalam Menegakkan Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)." *Repository Skripsi Universitas Muhammadiyah Mataram*, 2021.

Sandy Sulistiono dan Widyawati Boediningsih. “Konsep Kedaulatan Rakyat dalam Implementasi Presidential Threshold Pada Sistem Pemilihan Secara Langsung di Indonesia.” *Jurnal Rectum*, Vol 5, No 3, 2023.

Subiyanto, Achmad Edi. “Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia.” *Jurnal Konstitusi*, Vol 17, No 2, 2020.. <https://doi.org/10.31078/jk1726>.

Wahyudi Amar, Fauzi Syam, dan Rustian Mushawirya. “Kewenangan Pejabat Pengganti Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dari Prespektif Peraturan Perundang-Undangan.” *Mendapo: Journal of Administrative Law*, Vol 3, No 3, 2022.

C. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945..

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang *Pemilihan Umum*.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang *Aparatur Sipil Negara*.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang *Disiplin Pegawai Negeri Sipil*.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang *Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil*.

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 Tentang *Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil*.

Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 6 Tahun 2018 Tentang *Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara*.

Surat Keputusan Bersama 5 Lembaga/Kementerian Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 Tahun 2022 Tentang *Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum*.

D. Website / Internet

Humas. “Jenis Pelanggaran dan Sanksi Netralitas ASN Selama Pemilu Tahun 2024.” Badan Kepegawaian Negara, 2024. <https://www.bkn.go.id/jenis-pelanggaran-dan-sanksi-netralitas-asn-selama-pemilu-2024>.

- Humas. “Hasil Pemantauan Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024.” Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, 2023. <https://setkab.go.id/hasil-pemantauan-pelaksanaan-tahapan-pemilihan-umum-pemilu-tahun-2024>.
- Humas. “Hasil Perhitungan Resmi Pemilu Tahun 2024.” Bawaslu, 2024. <https://cimahikota.bawaslu.go.id/berita/kpu-tetapkan-hasil-pemilu-2024-usai-rampungkan-rekapitulasi-suara-dari-38-provinsi-dan-128>.
- Humas. “Kilas Pemilu Tahun 2024.” KPU Republik Indonesia, 2024. <https://www.kpu.go.id/page/read/1136/kilas-pemilu-tahun-2024>.
- Humas. “Mekanisme Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan Umum Tahun 2024.” Bawaslu, 2024. <https://jepara.bawaslu.go.id/mechanisme-penanganan-pelanggaran-pada-pemilihan-2024>.
- Humas. “Pengertian Pemilu.” <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-pemilu-fungsi-dan-prinsip/>, 28 Juni 2023.